

**PEMBERDAYAAN PELAKU EKONOMI KREATIF OLEH BIDANG  
EKONOMI KREATIF DINAS PARIWISATA KABUPATEN CIAMIS  
(STUDI KASUS PADA DESA PATAKAHARJA KECAMATAN RANCAH  
KABUPATEN CIAMIS)**

**Reza Andriani<sup>1\*</sup>, R. Didi Djadjuli<sup>2</sup>, Etih Henriyani<sup>3</sup>**  
<sup>1,2,3</sup> Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

\*Korespondensi : rezhaandr29@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan belum optimalnya Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif Oleh Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis (Studi Kasus Pada Desa Patakaharja Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis). Hal tersebut terlihat dari kurangnya komunikasi dalam hal sosialisasi antara pihak Dinas dan Desa, belum masifnya sinergitas antara pihak Dinas dan Desa, Kurangnya upaya pihak Dinas dalam memberikan evaluasi, serta memberikan aksesibilitas terhadap bantuan pendanaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif Oleh Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis di Desa Patakaharja. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer dengan 6 orang informan dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif Oleh Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis yang diukur dengan 5 dimensi, belum dapat berjalan dengan optimal. Hal tersebut terjadi karena masih terdapat hambatan dalam proses pelaksanaannya seperti keterbatasan dalam memberikan pelatihan teknis dan juga pendampingan kepada pelaku usaha yang belum menyeluruh, keterbatasan dalam peningkatan akses pemasaran dan permodalan, belum adanya kebijakan mengenai penetapan standar harga produk dan juga belum adanya peraturan mengenai kualitas produk usaha.

**Kata Kunci :** Pemberdayaan, Ekonomi Kreatif, Pelaku Usaha.

**ABSTRACT**

*The background of this research is the not yet optimal Empowerment of Creative Economy Actors by the Creative Economy Sector of the Ciamis Regency Tourism Office (Case Study in Patakaharja Village, Rancah District, Ciamis Regency). This can be seen from the lack of communication in terms of outreach between the Office and the Village, the lack of synergy between the Office and the Village, the lack of effort by the Service in providing evaluations, and providing accessibility to funding assistance. This study aims to determine the Empowerment of Creative Economy Actors by the Creative Economy Sector of the Ciamis Regency Tourism Office in Patakaharja Village. The research method used is a qualitative method with a case study approach. Data collection techniques in the form of library research and field studies consisting of observation, interviews, and documentation. Data sources consist of primary data with 6 informants*

*and secondary data. Based on the research results, it is known that the Empowerment of Creative Economy Actors by the Creative Economy Sector of the Ciamis Regency Tourism Office as measured by 5 dimensions has not been able to run optimally. This happens because there are still obstacles in the implementation process such as limitations in providing technical training and also assistance to business actors that are not yet comprehensive, limitations in increasing access to marketing and capital, the absence of policies regarding standard setting of product prices and also the absence of regulations regarding product quality. business.*

**Keywords :** *Empowerment, Creative Economy, Entrepreneurs.*

## **A. PENDAHULUAN**

Pemberdayaan dan pembangunan masyarakat merupakan 2 hal yang banyak diperbincangkan oleh masyarakat karena berkaitan dengan kemajuan dan perubahan bangsa ini pada masa yang akan datang.

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata (Zubaedi, 2013:20).

Gelombang revolusi 4.0 dianggap sudah mampu membawa perubahan penting terhadap berbagai tatanan kehidupan global, ditandai dengan semakin berkembangnya kreativitas serta inovasi dengan pemanfaatan teknologi kehidupan global termasuk persaingan bidang ekonomi. Era revolusi industri 4.0 menjadikan ekonomi kreatif menjadi salah satu isu strategis.

Istilah ekonomi kreatif berkembang dari konsep modal berbasis kreativitas yang dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di suatu daerah (Purnomo, 2016).

Ekonomi kreatif dan sektor wisata merupakan dua hal yang saling berpengaruh dan dapat saling bersinergi jika dikelola dengan baik.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan peningkatan ekonomi kreatif masyarakat, diperlukan strategi pemberdayaan khususnya oleh bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Bupati Ciamis nomor 109 tahun 2021 tentang uraian fungsi kelompok substansi pada organisasi jabatan administrator di lingkungan dinas pariwisata.

Dari 17 subsektor Ekonomi Kreatif yang ada, penelitian di Desa Patakaharja ini hanya memfokuskan pada 3 subsektor yaitu kuliner, fashion, dan kriya.

Di Kabupaten Ciamis terdapat 243 Desa dan 7 kelurahan yang masing-masing sudah membentuk komunitas Ekonomi Kreatif. Akan tetapi dari 243 Desa dan 7 Kelurahan tersebut hanya 38 Desa yang aktif dan maju dalam pengembangan usaha Ekonomi Kreatif di desanya. Desa patakaharja yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini merupakan salah satu desa yang sudah mempunyai komunitas Ekonomi Kreatif, akan tetapi tidak termasuk desa yang aktif dalam data Komunitas Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu hal ini menjadi penyebab utama bagi penulis untuk meneliti fenomena tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di Desa Patakaharja

Kecamatan Rancah ditemukan permasalahan mengenai pemberdayaan pelaku Ekonomi Kreatif oleh Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis yang masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator permasalahan sebagai berikut :

1. Kurangnya komunikasi antara pihak Dinas Pariwisata dengan pemerintah desa Patakaharja dalam hal sosialisasi, pelatihan, dan peningkatan pengetahuan teknis yang belum menyeluruh kepada para pelaku Ekonomi Kreatif. Hal ini menyebabkan komunitas ekonomi kreatif “Sabanda Sariksa” belum mengalami pengembangan secara sumber daya manusia, *skill* anggota, pengetahuan anggota, inovasi dan kreativitas dalam berwirausaha.
2. Belum masifnya sinergitas antara pihak dinas pariwisata dan pemerintah desa dalam penggalan potensi dengan memanfaatkan keunggulan lokal untuk dijadikan peluang usaha oleh para pelaku Ekonomi Kreatif, sehingga perkembangan ekonomi masyarakat hanya berhenti sampai disitu.
3. Kurangnya upaya dinas untuk memberikan evaluasi dalam meningkatkan manajemen usaha yang sudah dijalankan oleh pelaku Ekonomi Kreatif dan pemerintah Desa.
4. Kurangnya upaya dinas dalam memberikan aksesibilitas terhadap bantuan pendanaan kepada para pelaku usaha Ekonomi Kreatif yang sudah memiliki usaha yang baik namun terhambat dalam hal permodalan usaha.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “**Bagaimana pemberdayaan pelaku Ekonomi Kreatif Oleh Bidang**

**Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis** (Studi kasus pada Desa Patakaharja Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis)?”.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui Pemberdayaan pelaku Ekonomi Kreatif oleh Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis. Menurut Sugiyono (2019:18) Metode kualitatif adalah sebuah metode untuk penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti suatu kondisi obyek yang alamiah, (eksperimen adalah sebagai lawannya) instrument kunci adalah peneliti itu sendiri, sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan tringgulasi (gabungan), sifat dari analisis data yaitu induktif/kualitatif, dan hasil dari penelitian kualitatif ini lebih menekankan di bagian maknanya dari pada bagian generalisasi.

Adapun teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan, yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, buku literatur dan juga teori. Teknik analisis data terdiri dari tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, display data dan verivikasi dan penarikan kesimpulan. Adapun informan dalam penelitian ini terdapat 6 orang informan yaitu pejabat fungsional bidang ekonomi kreatif Dinas Pariwisata, Kepala Desa Patakaharja, ketua komunitas Ekonomi Kreatif Sabanda Sariksa, dan 3 pelaku usaha ekonomi kreatif dari bidang

fashion, kriya, dan kuliner.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui bagaimana Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif Oleh Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis, penulis melakukan penelitian melalui wawancara dan observasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan mengacu pada teori menurut Mardikanto dan Soebianto (2017:225) yang menjelaskan bahwa untuk mengukur pemberdayaan masyarakat melalui bina usaha dapat dilakukan dengan cara :

1. Peningkatan pengetahuan teknis, utamanya untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan mutu dan nilai tambah produk
2. Perbaikan manajemen untuk meningkatkan efisiensi pengembangan jejaring kemitraan
3. Pengembangan jiwa kewirausahaan terkait dengan optimalisasi peluang bisnis yang berbasis dan didukung oleh keunggulan lokal.
4. Peningkatan aksesibilitas terhadap modal, pasar dan informasi.
5. Advokasi kebijakan yang berpihak kepada pengembangan ekonomi rakyat

Adapun dimensi-dimensi tersebut dapat di uraikan kedalam beberapa indikator sebagai berikut :

#### 1. **Peningkatan pengetahuan teknis, utamanya untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan mutu dan nilai tambah produk**

Untuk menghasilkan suatu usaha yang baik maka diperlukan pengetahuan teknis didalamnya. Dimana pengetahuan teknis tersebut merupakan kemampuan dan pengetahuan khusus yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan atau tugas tertentu

dalam berwirausaha. Salah satu manfaat dari keterampilan teknis adalah dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berwirausaha. Dengan memiliki keterampilan teknis yang baik dalam berwirausaha, seseorang dapat menjalankan suatu usaha dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualitas produk usaha yang dihasilkan.

Dalam penelitian dimensi Peningkatan pengetahuan teknis, utamanya untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan mutu dan nilai tambah produk terdapat 3 indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan pengetahuan teknis yaitu adanya sosialisasi kepada pelaku usaha Ekonomi Kreatif, adanya pelatihan teknis dan adanya pendampingan.

Hasil penelitian pada pada dimensi peningkatan pengetahuan teknis sejauh ini belum berjalan dengan optimal. Dilihat dari ketiga indikator diatas, terdapat satu indikator yang sudah cukup optimal yaitu adanya sosialisasi kepada pelaku usaha Ekonomi Kreatif, meskipun hanya dilakukan satu kali saja pada awal pembentukan. Sedangkan terdapat 2 indikator lagi yang masih terkendala dalam pelaksanaannya sehingga belum efektif, seperti pelaksanaan pelatihan teknis dan juga pendampingan yang belum menyeluruh, hanya dilakukan pada pelaku usaha di bidang kuliner saja dikarenakan keterbatasan waktu dari pihak Dinas Pariwisata.

Adapun yang menjadi hambatan dalam hal ini yaitu keterbatasan SDM pihak Desa dalam mengembangkan ekonomi kreatif desa patakaharja sesuai arahan dari pihak Dinas, sehingga pihak Dinas belum bisa melakukan kegiatan pelatihan teknis atau bimbingan teknis untuk pelaku usaha ekonomi kreatif. Hal

ini menyebabkan ketertinggalan dengan desa lain yang sudah maju dalam sektor ekonomi kreatif.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu pihak desa menyerahkan kepada kaum muda yang tergabung dan mengurus komunitas ekonomi kreatif desa patakaharja dengan memberikan pelatihan atau bimbingan teknis kepada pelaku usaha dari berbagai sumber internet yang ada serta pihak Dinas mengikutsertakan pelaku usaha pada kegiatan seminar ataupun workshop baik yang dilakukan secara daring maupun luring.

Hal tersebut belum sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Veithzal Rivai dalam jurnal (Mulyani, 2017) “Pelatihan adalah bagian dari pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar sistem pendidikan yang lebih mengutamakan pada praktek daripada teori”.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian pada dimensi ini menunjukkan kurangnya upaya Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis dalam memberikan pelatihan teknis dan juga pendampingan secara menyeluruh kepada pelaku usaha Ekonomi Kreatif di Desa Patakaharja Kecamatan Rancah.

## **2. Perbaikan manajemen untuk meningkatkan efisiensi pengembangan jejaring kemitraan**

Manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan SDM, sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, untuk melakukan suatu pemberdayaan pada bina usaha salah satunya harus melakukan perbaikan

manajemen yang berarti proses manajemen yang sudah berjalan harus terus dikembangkan dan diperbaiki guna meningkatkan efisiensi usaha dan pengembangan jejaring kemitraan.

Dalam penelitian dimensi Perbaikan manajemen untuk meningkatkan efisiensi pengembangan jejaring kemitraan terdapat 3 indikator yang digunakan untuk mengukur perbaikan manajemen yaitu adanya bantuan modal, adanya pengembangan relasi dan adanya evaluasi.

Hasil penelitian pada dimensi perbaikan manajemen sejauh ini belum berjalan dengan optimal. Dilihat dari ketiga indikator diatas, terdapat dua indikator yang sudah cukup optimal yaitu adanya pengembangan relasi dan adanya evaluasi. Sedangkan satu indikator lagi yang masih terkendala dalam pelaksanaannya sehingga belum efektif, yaitu belum adanya bantuan atau pemberian modal usaha.

Adapun yang menjadi hambatan dalam hal ini yaitu keterbatasan dalam menjalankan produktivitas usaha yang disebabkan karena keterbatasan modal usaha terutama pelaku usaha mikro kecil menengah.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu pihak desa membantu pelaku usaha untuk memenuhi syarat perizinan seperti NIB dan PIRT agar bisa didaftarkan untuk mendapatkan program bantuan baik dari Provinsi maupun dari Kemenparekraf.

Hal tersebut belum sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ismail (2021) yang menyatakan bahwa “Lambannya akumulasi kapital dikalangan pengusaha mikro, kecil, dan menengah merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya

surplus usaha disektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Faktor modal juga menjadi salah satu sebab tidak munculnya usaha-usaha baru diluar sektor ekstraktif. Oleh sebab itu tidak salah, kalau dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, pemecahan dalam aspek modal ini penting dan memang harus dilakukan.”

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian pada dimensi ini menunjukkan kurangnya upaya Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis dalam memberikan bantuan permodalan kepada pelaku usaha Ekonomi Kreatif di Desa Patakarharja Kecamatan Rancah.

### **3. Pengembangan jiwa kewirausahaan terkait dengan optimalisasi peluang bisnis yang berbasis dan didukung oleh keunggulan lokal.**

Pengembangan merupakan istilah yang berhubungan dengan usaha berencana yang diselenggarakan untuk mencapai penguasaan skill dan pengetahuan. (Anwar, 2000). Sedangkan kewirausahaan dapat diartikan sebagai proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan (usaha). (Zimmerer dalam kasmir, 2014).

Dalam penelitian dimensi Pengembangan jiwa kewirausahaan terkait dengan optimalisasi peluang bisnis yang berbasis dan didukung oleh keunggulan lokal terdapat 2 indikator yang digunakan untuk mengukur pengembangan jiwa kewirausahaan yaitu adanya pengembangan jiwa kewirausahaan serta adanya pengembangan peluang bisnis dengan memanfaatkan keunggulan lokal.

Hasil penelitian pada dimensi pengembangan jiwa kewirausahaan sejauh ini sudah cukup optimal. Dilihat dari kedua

indikator diatas, keduanya sudah dilaksanakan dengan cukup optimal yaitu pihak Dinas Pariwisata sudah melakukan pengembangan jiwa kewirausahaan kepada pelaku Ekonomi Kreatif dan juga sudah melakukan pengembangan peluang bisnis dengan memanfaatkan keunggulan lokal, walaupun dalam prakteknya pihak dinas hanya memberikan motivasi saja kepada pelaku usaha dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan. Kemudian pelaksanaanya dilakukan pada waktu yang bersamaan pada saat sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan. Mengenai hal ini, pelaku usaha diharap sudah mempunyai jiwa kewirausahaan yang tinggi agar dapat mengembangkan usaha menjadi semakin maju.

Hal ini sejalan dengan pendapat Bamiatzi et al (2015) dalam (Handayani dan Bismala, 2022) yang menyatakan bahwa “Motivasi dapat bersumber dari internal (dalam diri karyawan ) maupun eksternal (faktor diluar diri karyawan). Sumber motivasi internal seperti kepuasan akan pekerjaan, adanya keinginan untuk menjadi lebih baik dan lain sebagainya. Sementara motivasi yang bersumber dari luar diri karyawan seperti adanya rekan kerja yang dapat bekerjasama, kompensasi yang memuaskan serta berbagai sumber lainnya.”

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian pada dimensi ini menunjukkan bahwa pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis sudah cukup optimal dalam melakukan pengembangan jiwa kewirausahaan kepada pelaku Ekonomi Kreatif dan juga sudah melakukan pengembangan peluang bisnis dengan memanfaatkan keunggulan local kepada pelaku usaha Ekonomi Kreatif di Desa Patakarharja Kecamatan Rancah.

#### **4. Peningkatan aksesibilitas terhadap modal, pasar dan informasi.**

Aksesibilitas terhadap modal yakni bagaimana pihak dinas dapat memberikan kemudahan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan bantuan permodalan. Kemudian aksesibilitas terhadap pasar berarti sejauh mana pihak dinas dapat meningkatkan segmen pasar agar dapat dijangkau baik melalui promosi, periklanan atau berbagai metode penjualan lainnya. Sedangkan aksesibilitas terhadap informasi, mengacu kepada seberapa besar upaya dinas dalam memberikan kemudahan informasi sehingga dapat diterima, dipahami, dan ditindaklanjuti baik oleh pihak desa maupun oleh pelaku usaha.

Dalam penelitian dimensi Peningkatan aksesibilitas terhadap modal, pasar dan informasi terdapat 3 indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan aksesibilitas yaitu adanya peningkatan aksesibilitas terhadap modal, pasar dan informasi

Hasil penelitian pada dimensi peningkatan aksesibilitas sejauh ini belum berjalan dengan optimal. Dilihat dari ketiga indikator diatas, terdapat satu indikator yang sudah cukup optimal yaitu adanya peningkatan aksesibilitas terhadap informasi, Sedangkan dua indikator lagi yang masih terkendala dalam pelaksanaannya sehingga belum efektif, yaitu belum adanya peningkatan aksesibilitas terhadap modal dan peningkatan aksesibilitas terhadap pasar.

Adapun yang menjadi hambatan dalam hal ini yaitu keterbatasan dalam menjalankan produktivitas usaha yang disebabkan karena keterbatasan modal usaha terutama pelaku usaha mikro kecil menengah.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu pihak desa membantu pelaku usaha untuk memenuhi syarat perizinan seperti NIB dan PIRT agar bisa didaftarkan untuk mendapatkan program bantuan baik dari Provinsi maupun dari Kemenparekraf.

Hal ini tidak sejalan dengan pendapat Herwina (2023) yang menyatakan bahwa “Program pemberdayaan masyarakat biasanya memfokuskan pada pemberdayaan ekonomi, sosial, dan politik masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat, memberikan modal usaha kepada masyarakat, serta memberikan akses terhadap sumber daya dan fasilitas yang diperlukan masyarakat.”

Kemudian menurut Amalia dan Bratakusumah (2023) menyatakan bahwa “Bantuan penguatan modal ini dapat dilakukan cara pemberian bantuan modal bergulir dari pemerintah melalui koperasi, terutama untuk program usaha berskala mikro dan kecil dalam bentuk *incubator* dan *cluster*.”

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dari teori diatas, diketahui bahwa pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif oleh Dinas Pariwisata mengenai peningkatan akses modal usaha dapat dikatakan belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan salah satu pelaku usaha yang mengatakan bahwa belum ada upaya apapun dari pihak dinas yang berkenaan dengan modal usaha.

#### **5. Advokasi kebijakan yang berpihak kepada pengembangan ekonomi rakyat**

Advokasi kebijakan adalah suatu proses terencana dan sistematis yang

dilakukan untuk memperbaiki atau mengubah suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan siapa yang mendesakkan terjadinya perbaikan dan perubahan tersebut, dengan jalan mempengaruhi.

Kemudian advokasi kebijakan yang dimaksud pada penelitian ini adalah advokasi kebijakan yang dilakukan oleh pihak dinas pariwisata yang berpihak kepada pengembangan ekonomi rakyat.

Dalam penelitian dimensi advokasi kebijakan yang berpihak kepada pengembangan ekonomi rakyat terdapat 2 indikator yang digunakan untuk mengukur advokasi kebijakan yaitu adanya kebijakan penetapan standar harga produk dan adanya peraturan yang mengatur tentang kualitas produk usaha.

Hasil penelitian pada dimensi advokasi kebijakan sejauh ini belum berjalan dengan optimal. Dilihat dari kedua indikator diatas keduanya masih belum berjalan dengan optimal.

Adapun yang menjadi hambatan dalam hal ini yaitu kurangnya pengetahuan mengenai cara pengembangan usaha. Sebagian besar pelaku usaha hanya fokus pada prosesnya tanpa berusaha meningkatkan kualitas produk yang ada. Salah satu penyebabnya ialah karena belum adanya peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah mengikutsertakan pelaku usaha pada kegiatan-kegiatan seminar dan workshop mengenai peningkatan kualitas produk usaha.

Mengenai penetapan standar harga produk, hal ini tidak sejalan dengan pendapat Benyamin Molan (2005) dalam (Harinie Luluk.T, dkk, 2023) yang

menyatakan bahwa “Penentuan harga perusahaan harus menetapkan harga sesuai dengan nilai yang diberikan dan dipahami pelanggan. Jika harganya ternyata lebih tinggi daripada nilai yang diterima, perusahaan tersebut akan kehilangan kemungkinan untuk memetik laba, jika harganya ternyata terlalu rendah daripada nilai yang diterima, perusahaan tersebut tidak akan berhasil menuai kemungkinan memperoleh laba.”

Kemudian menurut Guiltinan (2001) dalam (Saleh Yusuf dan Said Miah, 2019) menyatakan bahwa “kebijakan harga adalah strategi pemasaran yang ditetapkan oleh perusahaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor biaya produksi dan harga pesaing sehingga dengan alternatif harga yang dipilih dapat meningkatkan pembelian produk, meningkatkan permintaan non user, pelanggan yang menguntungkan dan menarik pelanggan baru dengan mutu.”

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dari teori diatas, diketahui bahwa pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif oleh Dinas Pariwisata mengenai kebijakan penetapan standar harga produk dapat dikatakan belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan yang tidak sejalan dengan pendapat teori diatas yakni belum adanya kebijakan mengenai penetapan standar harga produk.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemberdayaan pelaku Ekonomi Kreatif oleh Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis di Desa Patakarharja diketahui bahwa pemberdayaannya belum dilaksanakan dengan optimal. Dimana dari 5 dimensi



dengan 13 indikator yang dijadikan sebagai alat ukur penelitian, baru 6 indikator yang sudah dilaksanakan dengan cukup optimal. Sedangkan 7 indikator lagi pelaksanaannya belum optimal. Adapun indikator yang belum optimal tersebut adalah indikator kegiatan pelatihan teknis, indikator pendampingan kepada pelaku usaha, indikator bantuan atau pemberian modal, indikator peningkatan akses terhadap modal usaha, indikator peningkatan akses pemasaran, indikator kebijakan mengenai penetapan standar harga produk dan indikator peraturan yang mengatur tentang kualitas produk usaha. Sedangkan indikator yang pelaksanaannya sudah berjalan dengan cukup optimal adalah Kegiatan sosialisasi, Pengembangan relasi atau jaringan antar pelaku usaha, Evaluasi dalam peningkatan manajemen usaha, Pengembangan jiwa kewirausahaan, Pengembangan peluang bisnis, dan Peningkatan akses informasi.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis khususnya pada bidang Ekonomi kreatif di desa patakarharja terkait pemberdayaan pelaku Ekonomi Kreatif yaitu keterbatasan dalam memberikan pelatihan teknis dan juga keterbatasan dalam memberikan pendampingan kepada pelaku usaha yang belum menyeluruh, kemudian keterbatasan dalam memberikan bantuan atau pemberian modal usaha, keterbatasan dalam meningkatkan akses modal usaha dan peningkatan akses pemasaran produk, belum adanya kebijakan mengenai penetapan standar harga produk, dan belum adanya peraturan yang mengatur tentang kualitas produk usaha.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang

dihadapi Dinas Pariwisata khususnya bidang ekonomi kreatif yaitu yang pertama untuk mengatasi keterbatasan dalam memberikan pendampingan dan pelatihan teknis, pihak dinas mengikutsertakan pelaku usaha pada kegiatan-kegiatan seminar ataupun workshop baik secara daring maupun luring. Kemudian untuk mengatasi permasalahan modal usaha dan juga pemasaran, pihak dinas membantu untuk proses pembuatan izin berusaha seperti pembuatan Nomor Izin Berusaha (NIB) dan Perusahaan Industri Rumah Tangga (PIRT) agar bisa diikutsertakan pada program bantuan modal usaha baik dari provinsi maupun Kemenparekraf, dan juga agar produk bisa dipasarkan secara luas keluar daerah. Terakhir, untuk dapat memiliki standar harga produk dan juga peraturan mengenai kualitas produk usaha, akan didapatkan apabila pelaku usaha sudah memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) dan Perusahaan Industri Rumah Tangga (PIRT).

## E. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Aldy Rochmat, Purnomo. 2016. *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS*. Yogyakarta: Fadilatama.
- Amalia dan Bratakusumah. 2023. *Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan*. Solok : Mitra Cendekia Media.
- Handayani dan Bismala. 2022. *Monogrofi Eksplorasi Kompetensi Kewirausahaan Pelaku Usaha Kecil Menengah*. Medan : Umsu Press.
- Harinie Luluk. T, dkk. 2023. *Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran*. Bali: CV. Intelektual Manifes

- Media.
- Herwina Wiwin. 2023. *Perencanaan Program Pendidikan Masyarakat*. Madiun : CV. Bayfa Cendekia Indonesia.
- Ismail. 2021. *Bank Wakaf Miko: Sebuah Kajian Analisis Peran dan Tantangan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat*. Medan: CV. Merdeka Kreasi Group.
- Kasmir. 2014. *Kewirausahaan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Mangkunegara Anwar. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung : Pemuda Rosdakarya.
- Mardikanto dan Soebianto. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Mulyani.Y.S. 2017. Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Enterpreneurship Terhadap Motivasi Berwirausaha Mahasiswa Dalam Meningkatkan Industri Pariwisata. *Jurnal Khasanah Ilmu*. 8(2): 20-31.
- Saleh Yusuf & Said Miah. 2019. *Konsep dan Strategi Pemasaran*. Makasar: CV. Sah Media
- Sugiyono. 2019. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktek*. Jakarta: Pustaka Kencana Prenada Media Grup.
- Peraturan Bupati Ciamis nomor 109 tahun 2021 tentang uraian fungsi kelompok substansi pada organisasi jabatan administrator di lingkungan dinas pariwisata pada bagian keempat bidang Ekonomi Kreatif Pasal 5.